



LETTER OF ACCEPTANCE

Tim Redaksi Journal Policy And Maritime Review Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah telah menerima artikel dengan,

Judul : Collaborative Governance pada Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Penulis : Tri Anggarani Putri Suprihati, Bambang Kusbandrijo, Supri Hartono (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia)

Menyatakan bahwa naskah tersebut telah diterima oleh tim redaksi Journal Policy And Maritime Review dan akan ditindaklanjuti untuk diterbitkan pada edisi Volume 5 No 1 tahun 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Surabaya, 12 Juli 2026
Pimpinan Dewan Redaksi



Agus Subianto



 pmr.journal@hangtuah.ac.id

 **Editorial Address:**
Jl. Arief Rahman Hakim No.150,
Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY,
Jawa Timur 60111.



<https://pmr.hangtuah.ac.id>



E-ISSN 2964-2140



***Collaborative Governance* pada Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya**

Tri Anggarani Putri Suprihati^{1*}, Nama Penulis², Nama Penulis³

¹ Program Studi Administrasi Negara, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

anggaraniputr@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah, khususnya pada wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Program Keluarga Berencana (KB) menjadi instrumen kebijakan yang strategis untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang meliputi dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan DP3APPKB Kota Surabaya, BKKBN, puskesmas, kader KB, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Bentuk kolaborasi diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi, pelayanan kontrasepsi, Program Kampung KB, serta monitoring dan evaluasi program. Dampak yang dihasilkan berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga berencana, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi, dan meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan jumlah kader serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap manfaat program KB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Program Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Kebijakan Publik.*

ABSTRACT

Population growth remains one of the major challenges in regional development, particularly in urban areas with high population density. The Family Planning Program (Program Keluarga Berencana/KB) serves as a strategic policy instrument to control population growth and improve family welfare. This study aims to analyze the

implementation of collaborative governance in the Family Planning Program to control population growth in Kenjeran District, Surabaya City. The research employed a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis used the Collaborative Governance framework developed by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), consisting of collaboration dynamics, collaborative actions, and impacts and adaptation. The findings indicate that collaborative governance has been effectively implemented through the active involvement of the DP3APPKB Surabaya City, BKKBN, health centers, family planning cadres, local governments, and the community. Collaboration is reflected in communication, coordination, joint decision-making, integrated service delivery, and continuous monitoring and evaluation. The implementation of collaborative governance has contributed to increased public awareness regarding family planning, higher participation in contraceptive use, and improved access to reproductive health services. However, several challenges remain, including limited human resources and misconceptions about family planning among certain community groups. Strengthening stakeholder coordination, increasing cadre capacity, and expanding public education are recommended to enhance the sustainability of the program.

Keywords: Collaborative Governance, Family Planning Program, Population Growth, Public Policy.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan publik yang semakin kompleks menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi mampu menyelesaikan berbagai persoalan publik secara mandiri karena keterbatasan sumber daya, kewenangan, maupun kapasitas kelembagaan. Kondisi tersebut mendorong munculnya pendekatan collaborative governance sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor lintas sektor secara konstruktif untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh satu organisasi secara sendiri.

Penerapan collaborative governance menjadi semakin penting dalam menangani berbagai persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional, salah satunya adalah masalah kependudukan. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan isu yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, kader lapangan, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kompleksitas permasalahan kependudukan menyebabkan keberhasilan kebijakan pengendalian penduduk sangat bergantung pada kualitas kolaborasi yang terbangun antar pemangku kepentingan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengendalian penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB). Program ini bertujuan untuk mengatur angka kelahiran, meningkatkan kesehatan reproduksi, mewujudkan keluarga berkualitas, serta menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Dalam pelaksanaannya, Program KB tidak hanya melibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tetapi juga pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader KB, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sebagai sasaran program. Oleh karena itu, keberhasilan Program KB dapat dipandang sebagai hasil dari proses kolaborasi antar berbagai stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda.

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang secara aktif melaksanakan Program Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya pengendalian penduduk. Dalam pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam Program KB. Bentuk kerja sama tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, kegiatan penyuluhan, pembinaan Kampung KB, pendampingan keluarga, hingga monitoring dan evaluasi program.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan Program KB adalah Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan data Profil Kecamatan Kenjeran Tahun 2024, Kecamatan Kenjeran memiliki jumlah penduduk sebanyak 131.857 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 9.144 jiwa/km². Selain itu, jumlah pasangan usia subur (PUS) tercatat sebanyak 19.995 pasangan dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 16.615 pasangan. Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kenjeran memiliki karakteristik kependudukan yang membutuhkan pengelolaan secara optimal melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran, terdapat berbagai stakeholder yang terlibat, yaitu DP3APPKB Kota Surabaya, BKKBN, puskesmas, pemerintah kelurahan, kader keluarga berencana, kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan), serta masyarakat. Masing-masing stakeholder memiliki fungsi dan peran yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mencapai tujuan program. DP3APPKB berperan sebagai koordinator pelaksanaan program di tingkat daerah, BKKBN memberikan dukungan kebijakan dan teknis, puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, sedangkan kader KB menjadi ujung tombak dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat.

Keberadaan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran tidak dapat dipisahkan dari proses collaborative governance. Namun demikian, proses kolaborasi yang melibatkan banyak stakeholder tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan Program KB, seperti keterbatasan jumlah kader KB, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana, serta masih adanya persepsi negatif terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, efektivitas koordinasi antar stakeholder juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan Program Keluarga Berencana dari aspek efektivitas program, partisipasi masyarakat, maupun peran pemerintah dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji Program Keluarga Berencana melalui perspektif Collaborative Governance menggunakan model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), khususnya di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada capaian program, sementara proses kolaborasi yang terjadi di antara stakeholder belum banyak dianalisis secara mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji bagaimana proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance dari (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012) Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana dinamika kolaborasi yang terbentuk antar stakeholder, bagaimana tindakan kolaboratif dilaksanakan, serta bagaimana dampak dan adaptasi yang muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut (Dewi 2019) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aktor lain yang memiliki pengaruh dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik mencakup berbagai bentuk, mulai dari peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, hingga tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

(Publik et al. 2020) disebutkan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, kebijakan publik juga mengatur semua yang ada dimana lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut (KementerianPUPR et al. 2023)Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruangan khusus”. Kebijaka publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Qintharah 2008)

Collaborative Governance

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB). Namun, pelaksanaan program ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara mandiri, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti BKKBN, DP3APPKB, Dinas Kesehatan, puskesmas, kader KB, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan program secara efektif.

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012)Dinamika tersebut kemudian diwujudkan dalam *collaborative actions* berupa berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya, proses kolaborasi menghasilkan *impacts and adaptation* yang menunjukkan dampak kolaborasi serta kemampuan para aktor dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana hubungan kerja sama dibangun, tindakan kolaboratif dilaksanakan, serta dampak yang dihasilkan dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendasar mengenai proses kolaborasi yang terjadi di antar stakeholder dalam pelaksanaan program, mulai dari pembentukan hubungan kerja sama, pelaksanaan tindakan kolaboratif, hingga dampak yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Fokus penelitian penelitian mengacu pada model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012) Dimensi Collaboration Dynamics dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Selanjutnya, Collaborative Actions digunakan untuk mengidentifikasi bentuk

tindakan kolaboratif yang dilakukan para stakeholder, sedangkan Impacts and Adaptation digunakan untuk menganalisis dampak dan bentuk adaptasi yang muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan melibatkan stakeholder yang memiliki peran dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyuluh KB, kader KB, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan program. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika kolaborasi antar stakeholder, observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Berencana secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa laporan kegiatan, data kependudukan, serta dokumen pendukung lainnya.

D. Hasil dan Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana (KB) sebagai Upaya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak dapat dijalankan hanya oleh satu instansi karena kompleksitas permasalahan kependudukan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menerapkan pendekatan Collaborative Governance yang melibatkan (DP3APPKB) Kota Surabaya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fasilitas pelayanan kesehatan, penyuluh KB, kader KB, serta masyarakat sebagai kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana dapat dianalisis menggunakan model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang terdiri atas Collaboration Dynamics, Collaborative Actions, serta Impacts and Adaptation.

Collaboration Dynamics

Berdasarkan hasil penelitian, Principled Engagement dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan aktif berbagai stakeholder dalam mengidentifikasi permasalahan, menyusun strategi, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Proses kolaborasi diawali dengan identifikasi kondisi kependudukan melalui pendataan keluarga, pemetaan pasangan usia subur (PUS), serta identifikasi peserta KB aktif dan nonaktif yang dilakukan oleh DP3APPKB, penyuluh KB, kader KB, dan pihak terkait lainnya.

PASANGAN USIA SUBUR YG BELUM BER.KB... KAMPUNG KB POGOBAR INDAH KEL.TANAH KALI - KEDINDING.KEC.KENJERAN.TAHUN 2026						
NO	RW	ALASAN PUS YG TIDAK BER.KB.				Jumlah
		HAHIL	INGIN ANAK SEDIKA (1.5-5)	INGIN ANAK DITUMBUH (1.6-7)	TIDAK INGIN ANAK (1.8-10)	
1	I	9	17	23	106	245
2	II	15	9	22	74	131
3	III	2	5	16	56	79
4	IV	21	15	97	103	236
5	V	19	7	24	114	160
6	VI	5	3	3	44	55
7	VII	3	3	3	8	17
8	VIII	2	-	15	25	42
9	IX	14	8	27	78	127
10	X	48	15	5	94	162
11	XI	1	1	1	5	8
12	XII	3	2	-	8	13
Jumlah		162	83	236	735	1064

PESERTA KB.AKTIF WILAYAH KAMPUNG KB. TAHUN:2026 KEL.TANAH KALIKEDINDING.KEC.KENJERAN											
NO	RW	PUS	JENIS KONTRASEPSI							JUMLAH	KETERANGAN
			IUD	MOW	MOP	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KEDINDING		
1	I	1.280	98	33	3	53	518	180	12	867	
2	II	827	41	23	0	29	109	78	7	580	
3	III	443	9	8	0	11	240	27	1	296	
4	IV	1.420	61	46	0	49	458	94	13	718	
5	V	658	36	35	2	21	214	71	6	391	
6	VI	295	13	28	6	9	88	18	4	196	
7	VII	143	10	3	0	0	46	28	5	92	
8	VIII	214	2	7	15	5	180	6	1	196	
9	IX	332	11	13	0	7	75	39	6	191	
10	X	884	35	63	2	39	520	92	6	604	
11	XI	77	5	4	0	7	7	4	0	27	
12	XII	65	12	2	0	7	8	1	0	30	
Jumlah			672	399	267	118	2.238	1.694	69	7.420	

Data Pendataan KB di Kecamatan Kenjeran

Sumber Rumah Data Kampung KB Kecamatan Kenjeran

Dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah terhadap pentingnya Program Keluarga Berencana. Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan pola pikir tradisional yang meyakini bahwa “banyak anak banyak rezeki”. Kepercayaan tersebut menyebabkan sebagian pasangan usia subur kurang terdorong untuk mengikuti program keluarga berencana karena menganggap banyaknya jumlah anak dapat memberikan keuntungan ekonomi dan menjadi sumber kesejahteraan keluarga di masa depan. Di samping itu, masih terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi akibat kurangnya pemahaman mengenai manfaat, keamanan, serta efek samping kontrasepsi. Berbagai permasalahan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan bersama antar stakeholder untuk mencari solusi yang tepat dalam mendukung keberhasilan program. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar stakeholder. DP3APKB Kota Surabaya berperan sebagai koordinator program yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan, BKKBN memberikan dukungan teknis dan kebijakan, fasilitas kesehatan menyediakan pelayanan kontrasepsi, sedangkan penyuluh dan kader KB berperan sebagai pelaksana sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya kesepakatan dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan program. Dengan demikian, proses Principled Engagement dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena stakeholder mampu membangun komunikasi, koordinasi, dialog, serta pengambilan keputusan secara kolaboratif. Kondisi ini sejalan dengan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menyatakan bahwa keterlibatan stakeholder melalui proses identifikasi masalah, musyawarah, dan kesepakatan

bersama merupakan fondasi utama dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Shared Motivation dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tercermin dari adanya tujuan bersama yang dimiliki oleh seluruh stakeholder untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Kesamaan tujuan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama yang kuat antar stakeholder sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan. Hubungan tersebut dibangun melalui rasa saling percaya (mutual trust) yang muncul dari keterlibatan masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. DP3APPKB memberikan kepercayaan kepada penyuluh dan kader KB dalam menyampaikan informasi serta melakukan pendampingan kepada masyarakat, sementara fasilitas kesehatan dipercaya untuk memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman dan berkualitas. Kepercayaan tersebut menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan mendukung efektivitas pelaksanaan program. Selain adanya kepercayaan, penelitian juga menunjukkan adanya pemahaman bersama (mutual understanding) mengenai tugas, fungsi, dan peran masing-masing stakeholder. Setiap pihak memahami kontribusi yang harus diberikan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terkoordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kondisi tersebut diperkuat oleh adanya internal legitimacy, yaitu pengakuan terhadap pentingnya peran setiap stakeholder dalam mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana. Seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan tanpa adanya dominasi dari salah satu stakeholder. Di samping itu, tingginya komitmen (commitment) juga terlihat dari konsistensi stakeholder dalam melaksanakan berbagai kegiatan program seperti penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, monitoring, evaluasi, serta pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan kuatnya pengaruh budaya yang mendukung banyak anak, seluruh stakeholder tetap menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan program. Oleh karena itu, dimensi Shared Motivation dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan telah terbentuk dengan baik karena didukung oleh adanya kepercayaan, pemahaman, legitimasi, dan komitmen bersama yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi Capacity for Joint Action menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran didukung oleh kapasitas kolaboratif yang memadai dalam menjalankan tindakan bersama. Kapasitas tersebut terlihat dari adanya pengaturan kelembagaan dan prosedur kerja (procedural and institutional arrangements) yang jelas sehingga setiap stakeholder memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana telah didukung oleh berbagai regulasi, petunjuk teknis, serta mekanisme koordinasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Kejelasan aturan tersebut membantu stakeholder dalam memahami perannya masing-masing serta mempermudah proses koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dari aspek kepemimpinan (leadership), DP3APPKB Kota Surabaya memiliki peran penting sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan program. Kepemimpinan yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun komunikasi, menyelesaikan permasalahan, dan menjaga keberlangsungan kolaborasi. Selain itu, kapasitas tindakan bersama juga didukung oleh aspek pengetahuan (knowledge) yang dimiliki oleh para stakeholder. Berbagai pelatihan, pembinaan, dan kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada penyuluh dan kader KB

menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, dan strategi komunikasi kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, dari aspek sumber daya (resources), pelaksanaan Program Keluarga Berencana didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader KB, fasilitas pelayanan kesehatan, serta dukungan anggaran yang digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan program. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa jumlah kader KB yang masih terbatas serta luasnya wilayah sasaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses sosialisasi dan pendampingan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Namun demikian, stakeholder berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia melalui kerja sama dan koordinasi yang berkelanjutan sehingga pelaksanaan Program Keluarga Berencana tetap dapat berjalan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas tindakan bersama yang dimiliki stakeholder telah menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi Collaborative Governance pada Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Collaborative Actions

Dimensi Collaborative Actions menunjukkan berbagai tindakan nyata yang dilakukan oleh stakeholder sebagai hasil dari proses kolaborasi yang telah dibangun.



Gambar Pertemuan dalam Kolaborasi Lintas Sektor

Sumber : kemenduk bangsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindakan kolaboratif dalam Program Keluarga Berencana diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, pembinaan Kampung KB, pendataan keluarga, serta pendampingan pasangan usia subur. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh DP3APPKB, BKKBN, fasilitas kesehatan, penyuluh KB, dan kader KB sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu bentuk tindakan kolaboratif yang paling dominan adalah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini dilakukan secara langsung melalui pertemuan warga, kegiatan posyandu, pembinaan kelompok keluarga, serta kegiatan Kampung KB. Selain itu, stakeholder juga menyediakan pelayanan kontrasepsi yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. Bentuk kolaborasi lainnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Impacts and Adaptation

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana memberikan dampak positif terhadap upaya pengendalian laju pertumbuhan

penduduk di Kecamatan Kenjeran. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana, meningkatnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan Program KB. Kolaborasi yang terjalin antar stakeholder juga membantu memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan yang lebih mudah diakses. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi pelaksanaan program, seperti masih kuatnya budaya "banyak anak banyak rezeki", rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, serta keterbatasan jumlah kader KB dalam menjangkau seluruh masyarakat sasaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, stakeholder melakukan berbagai bentuk adaptasi, antara lain meningkatkan intensitas sosialisasi, memperkuat peran kader KB, memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyampaian informasi mengenai pentingnya keluarga berencana. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dinamika kolaborasi yang baik, pelaksanaan tindakan kolaboratif yang terkoordinasi, serta dampak positif yang dihasilkan dalam mendukung upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian, penguatan edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas kader KB, dan optimalisasi koordinasi antar stakeholder masih perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui dimensi Collaboration Dynamics yang meliputi Principled Engagement, Shared Motivation, dan Capacity for Joint Action. Pada aspek Principled Engagement, stakeholder mampu membangun komunikasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya Program KB, adanya kekhawatiran terhadap penggunaan alat kontrasepsi, serta masih kuatnya pola pikir tradisional yang meyakini bahwa "banyak anak banyak rezeki". Pada aspek Shared Motivation, seluruh stakeholder memiliki tujuan yang sama untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga sehingga tercipta hubungan kerja sama yang didukung oleh kepercayaan, pemahaman, legitimasi, dan komitmen bersama. Sementara itu, pada aspek Capacity for Joint Action, pelaksanaan program telah didukung oleh regulasi, kepemimpinan, pengetahuan, serta sumber daya yang cukup memadai meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah kader KB dalam menjangkau seluruh masyarakat sasaran.

Implementasi kolaborasi tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai Collaborative Actions berupa sosialisasi, penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, pendampingan masyarakat, serta pembinaan Kampung KB yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh stakeholder. Kolaborasi yang terbangun juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana, peningkatan akses pelayanan KB, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program. Namun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan

untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. "KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi Dan Evaluasi." *Samudra Biru*: 268.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1): 1–29. doi:10.1093/jopart/mur011.
- KementerianPUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, 赫晓霞, Tulo Iv, et al. 2023. 53 *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Publik, Pelayanan, Dasar Bidang, Sosial Di, and Kota Makassar. 2020. "Institutional Research." *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions*: 1765. doi:10.1007/978-94-017-8905-9_300383.
- Qintharah, Yuha Nadhirah. 2008. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Atmospheric Environment* 42(13): 2934–47.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. "KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi Dan Evaluasi." *Samudra Biru*: 268.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1): 1–29. doi:10.1093/jopart/mur011.
- KementerianPUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, 赫晓霞, Tulo Iv, et al. 2023. 53 *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Publik, Pelayanan, Dasar Bidang, Sosial Di, and Kota Makassar. 2020. "Institutional Research." *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions*: 1765. doi:10.1007/978-94-017-8905-9_300383.
- Qintharah, Yuha Nadhirah. 2008. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Atmospheric Environment* 42(13): 2934–47.